BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data sesuai dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Sesuai dengan tema dari penelitian yaitu peran uang dalam sebuah pernikahan terhadap Elinor dan Marianne pada novel *Sense and Sensibility*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan uang berperan penting dalam pernikahan Elinor dan Marianne, sehingga Elinor dan Marianne tidak bisa menikah dengan laki-laki yang mereka cintai. Faktor-faktor tersebut adalah faktor status sosial, properti, dan *women as property*. Oleh karena itu, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Marxisme tentang status sosial, properti, dan *women as property*.

2.1 Marxisme

Marxisme adalah teori yang dikembangkan oleh para filsuf Jerman bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme didasarkan pada sistem ekonomi dan sosial yang mengritik kapitalisme, seperti kelas sosial dan eksploitasi dengan tujuan membuat masyarakat tanpa kelas, masyarakat tanpa klasifikasi sosial (Barry, 2010: 183). Begitu pun dengan lahirnya marxisme merupakan bentuk awal dari penolakan Marx terhadap sistem kapitalis, yang disebabkan oleh terjadinya kesenjangan sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat Eropa yang mana kaum-kaum yang berasal dari bangsawan (borjuis) telah

menguasai kaum bawah (proletar). Saat itu kaum proletar (buruh) dipaksakan untuk bekerja hanya demi kaum bangsawan.

Pekerjaan adalah manifestasi dari roda sebuah penghasilan, namun ada jenis pekerjaan yang tersembunyi, yakni "modal". Menurut hukum logika, siapa yang bekerja maka dia akan menuai hasil, namun terdapat pula kondisi seorang yang tidak bekerja dan tetap mendapat hasil yang lebih tinggi dari orang yang bekerja. Kondisi semacam ini hanya dialami oleh kaum borjuis. Sistem seperti inilah yang dikenal dengan sistem kapital (Marx and Engels, 1848: 10).

Dalam kutipan *"Capital is the all dominating economic power of bourgeois society."* Marx menyatakan bahwa kapital adalah modal ekonomi yang didominasi oleh kaum borjuis yang berwujud ketidaksetaraan keuntungan antara borjuis dengan proletar akibat dari egoisme pihak borjuis. Egoisme yang dimiliki oleh kaum borjuis adalah keinginannya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

2.1.1 Status sosial

Status sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan pekerjaan dan posisi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, Eitzen dan Zinn (1991: 231) menyatakan bahwa status sosial adalah konsep yang rumit yang berpusat pada ekonomi. Ini berarti bahwa status sosial didasarkan pada berapa banyak uang yang dimiliki seseorang.

Status sosial memiliki peran tertentu dalam menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat dipegang oleh kelas atas dan kelas

menengah yang memiliki banyak uang sehingga mereka bisa mendapatkan hak istimewa. Marx dan Engels (1846) menyatakan bahwa secara sosiologis status sosial merupakan satu bentuk pengelompokan orang-orang ke dalam lapisan-lapisan masyarakat berdasarkan dimensi tersebut. Dengan demikian, status sosial memiliki peran dalam hubungan seseorang dan mempengaruhi kehidupan pribadi seperti dalam pernikahan mereka. Perkembangan status sosial sangat penting untuk mengisi kesenjangan sosial antara kelas atas-kelas menengah dan kelas bawah. Mereka membenarkan bahwa dalam masyarakat yang menganut sistem kelas sosial mempunyai kekayaan dan mempunyai uang maka mereka akan memiliki hubungan antara perkembangan *private property*—kekayaan pribadi—dengan penindasan terhadap kaum perempuan.

Orang-orang dari semua kelas sosial, tentunya ingin mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, sehingga untuk mencapai posisi tersebut mereka menggunakan semua upaya untuk mencapai ambisi mereka dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Orang yang memiliki status sosial tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang berstatus sosialnya rendah.

2.1.2 Properti

Properti sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, karena akan menentukan tingkat kebahagiaan seseorang. Properti dalam hukum Borjuis menentukan aturan tentang warisan. Aturan waris dalam hukum Borjuis akan

jatuh ke tangan anak laki-laki pertama. Sekaya apapun seorang perempuan, ketika dia sudah menikah maka semua kekayaannya akan jatuh ketangan laki-laki. Engels (1846: 18) menyebutkan bahwa "pernikahan didasarkan pada supremasi laki-laki, dengan tujuan yang menghasilkan anak-anak dari ayah tak terbantahkan, karena anak-anak ini yang akan mewarisi kekayaan ayah mereka sebagai pewaris alami." Berdasarkan pernyataan Marx di atas, laki-laki memegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga, sehingga apabila dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki, semua warisan akan jatuh kepada dia.

Oleh sebab itu, kedudukan kaum laki-laki sebagai pewaris dianggap lebih tinggi daripada kaum perempuan karena kesetaraan pada perempuan dan laki-laki tidak akan pernah ada, sehingga perempuan berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki dan berakibat dia mengalami eksploitasi oleh kaum laki-laki. Engels (1846) menyatakan bahwa kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada sifat yang melekat pada mereka, tetapi merupakan hasil dari kondisi sosial yaitu sebuah kondisi yang mengakibatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada abad ke-18, perempuan dapat menjadi kaya ketika dia telah mewarisi kekayaan ayahnya jika dia tidak memiliki saudara laki-laki.

Menurut Engels dalam Murray (1995: 1350), seorang perempuan hanya mengurus rumah, keluarga, dan melahirkan. Ketika ikatan suami-istri baru dijalin antara kelompok-kelompok sosial, laki-laki akan pindah dari keluarga asal mereka ke dalam lingkaran keluarga pasangan mereka. Dengan demikian ketika laki-laki menikah, mereka lebih mengutamakan istri mereka daripada keluarganya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Engels berspekulasi bahwa pria diciptakan patriarki, suatu sistem warisan yang akan diwarisi melalui jalur ayah. Dia menjamin bahwa mereka dan keturunan laki-laki mereka akan mempertahankan *private property*-kepemilikan kekayaan- yang dimilikinya. Bahkan disebabkan oleh kedudukannya yang dianggap lebih tinggi, perempuan menjadi milik dari laki-laki—*women as property*.

2.1.3 *Women as property*

Perempuan selalu tunduk dan patuh kepada laki-laki, sehingga perempuan hanya diam di rumah, mengurus suami, tidak melakukan apa-apa, dan melahirkan. Hal ini membuat perempuan hanya dianggap sebagai properti, atau dikenal dengan istilah *women as property*. Hak milik perempuan pada abad ke-18 sebagian besar tergantung pada status perkawinan mereka. Begitu perempuan menikah, hak milik mereka diatur oleh hukum umum Inggris, yang mengharuskan bahwa kekayaan perempuan dalam sebuah pernikahan, secara hukum dimiliki oleh suami mereka. Teori yang akan digunakan adalah teori Marxisme. Seperti dalam kutipan berikut ini:

> *As well -- traditionally, women lost all rights to own property or exercise contract rights after marriage. Before marriage, such rights usually belonged not to the woman, but to her father.* (Engels, 1846: 23)

Perempuan akan kehilangan semua haknya untuk memiliki harta setelah dia menikah. Sebelum menikah, hak-hak tersebut biasanya tidak dimiliki perempuan, tapi milik ayahnya. Begitu pun setelah menikah, semua harta akan

tetap menjadi milik laki-laki dan perempuan tidak memperoleh bagian meski hanya sedikit.

Dalam hal ini, perempuan kembali lagi kepada statusnya yaitu sebagai seorang anak dan istri, sehingga kadang-kadang dipaksa untuk memiliki anak. Pada abad ke-18 terdapat sebuah undang-undang bernama *coverture law* (1701) yang menyebutkan bahwa suami berhak atas semua harta pribadi istri. Di samping itu, pernikahan dan properti dalam undang-undang ini menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tidak memiliki kekuatan hukum yang terpisah dari suaminya, sehingga perempuan hanya dapat menuruti perkataan suaminya.

Dalam hal pernikahan, perempuan sangat bergantung kepada laki-laki. Ketergantungannya ini menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan sehingga salah satu akibatnya adalah mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk mereka keluar dari kemiskinan adalah dengan menikahi laki-laki kaya, sebab pada abad ini semua properti diwarisi oleh keturunan laki-laki. Meski pun demikian, perempuan tidak dapat memiliki kekayaan yang diberikan suaminya dan hanya dapat menikmatinya selama dia berstatus sebagai istri laki-laki tersebut. Dengan kata lain, sebuah pernikahan hanya dianggap sebagai pertukaran komersil yang membuat masing-masing pasangan hanya dimanfaatkan untuk mengorbankan cintanya demi sebuah properti.

Peran istri sebagai perempuan bersuami, menekankan subordinasi kepada suaminya, dan menempatkan dia dalam perlindungan dan pengaruh suaminya. Setelah menikah, suami dan istri menjadi satu orang di bawah hukum, seorang

perempuan harus menyerah kepada laki-laki. Properti yang dimiliki oleh perempuan selama pernikahan, sepenuhnya akan menjadi milik laki-laki. Perempuan sering terbatas dalam memiliki properti, sedangkan pria lebih mungkin untuk menerima properti seperti sebidang tanah. Anak laki-laki sulung secara hukum akan mewarisi kekayaan ayahnya, dan perempuan akan mewarisi kekayaan ayahnya apabila tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya. Oleh karena itu, status sosial dan properti mempengaruhi kebahagiaan perempuan dan mempengaruhi pernikahan mereka. Hal ini yang menyebabkan perempuan hanya dianggap sebagai properti, sehingga dalam hal ini, uang sangat diperlukan untuk kebahagiaan pernikahan mereka.